

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar di setiap tahunnya. Saat ini jumlah penduduk di Indonesia menempati posisi keempat terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 250 juta jiwa. Dalam sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk banyak, pastinya akan dihadapi dengan berbagai permasalahan mulai dari angka kejahatan yang tinggi, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran serta tingginya angka pertumbuhan penduduk. Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Menurut Muslim Pengangguran adalah salah satu masalah dalam ketenagakerjaan yang dihadapi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengangguran dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi banyak faktor pula.¹

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak

¹ Agus Yulistianto, dkk, 2021, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, Cirebon, Insania, Hlm 25.

tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.² Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan khusus, terbatasnya kesempatan kerja, dll. Pengangguran besar-besaran, jika tidak diselesaikan, akan menimbulkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Jika masalah pengangguran dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar akan memicu krisis sosial. Hal ini terlihat dari banyaknya fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, seperti banyaknya pengamen jalanan dan tingginya angka kriminalitas dimana-mana. Pengangguran yang terjadi pada penduduk yang bekerja tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena menurunnya tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengangguran juga dapat diakibatkan oleh pekerjaan yang ada yang membutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh pencari kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu negara dimana tingkat pengangguran tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dikarenakan bertambahnya jumlah tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja (Rifqi, 2014).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia per tahun 2022 sudah mencapai 8,4 juta jiwa atau setara dengan 5,86

² Tri Widayati, *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, Cirebon, Insania, Hlm 51, 2021.

persen dari total angkatan kerja nasional yang mencapai 143,72 juta orang. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) salah satu permasalahan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah digitalisasi, hal ini menyebabkan berkurangnya penyerapan angkatan kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran.³ Terkait digitalisasi, baik Indonesia maupun dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, dimana teknologi dapat menggantikan tenaga manusia. Dampak Revolusi Industri diperkirakan akan mengakibatkan pengangguran 50 juta penduduk Indonesia, atau hampir setengah dari angkatan kerja. Hal ini terjadi karena tenaga kerja Indonesia masih rentan terhadap perkembangan teknologi. Saat ini, digitalisasi memegang peranan penting di berbagai industri, mulai menggunakan berbagai mesin berteknologi canggih dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap lapangan kerja.

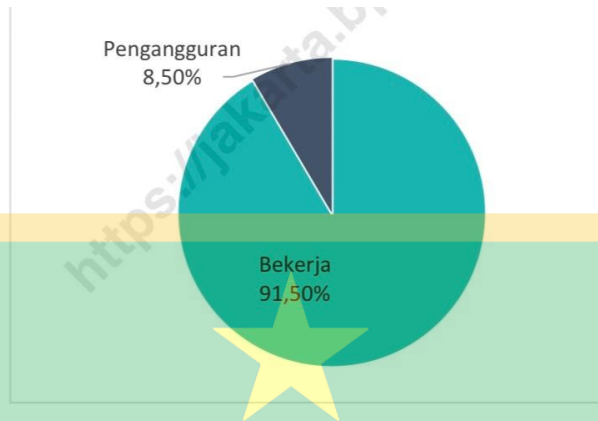
Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95% atau setara dengan 572.780 orang. Dibandingkan dengan situasi Agustus tahun lalu, tingkat pengangguran DKI Jakarta meningkat 4,41% atau bertambah 233.378 orang. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya pengangguran di ibu kota. Sebanyak 175.890 orang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Mereka berhenti bekerja karena perusahaan terdampak Covid-19 atau penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama pandemi, sektor formal kehilangan 453.295 tenaga kerja, namun

³ Diakses dari situs bisnis.com pada tanggal 15 Maret 2023.

hanya 259.597 yang mampu terserap oleh sektor informal, hasilnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka DKI di Provinsi DKI Jakarta naik menjadi 10,95 persen pada Agustus 2020. Kenaikan angka pengangguran tersebut disebabkan oleh jenis kelamin dan pendidikan pekerja. Tingkat pengangguran laki-laki meningkat sebesar 4,54 persen menjadi 11,06 persen dan perempuan sebesar 4,19 persen menjadi 10,76 persen pada Agustus 2020.

Jumlah pengangguran di Jakarta pada Agustus 2021 berkurang sekitar 133 ribu orang dibandingkan Agustus 2020 yang lalu. Hal ini dihubungkan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang memberikan efek positif terhadap kondisi ketenagakerjaan khususnya pengangguran di Jakarta. Seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta juga mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi pada Agustus 2021. TPT Jakarta turun 2,45 persen poin menjadi 8,50 persen pada Agustus 2021. Penurunan TPT ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Menurut jenis kelamin, TPT perempuan turun lebih besar dibandingkan TPT laki-laki. TPT perempuan turun 2,65 persen poin menjadi 8,12 persen. Sedangkan TPT laki-laki turun 2,33 persen poin menjadi 8,73 persen. Secara absolut, pengangguran laki-laki berkurang 82 ribu orang dan pengangguran perempuan berkurang 51 ribu orang.⁴

⁴ Diakses dari situs jakarta.bps.go.id pada tanggal 15 Maret 2023.



Gambar 1.1

Proporsi Angkatan Kerja di DKI Jakarta Agustus 2021

Sumber diakses melalui website jakarta.bps.go.id

Angkatan kerja terdiri dari pekerja dan pengangguran. Hingga Agustus 2021, terdapat 5,18 juta penduduk yang bekerja di Jakarta atau 62,63 persen dari total penduduk usia kerja. Tenaga kerja pria sebanyak 3,20 juta orang (61,73%), tenaga kerja wanita sebanyak 1,98 juta orang (38,27%). Mempekerjakan 91,50 persen tenaga kerja atau sekitar 4,74 juta orang secara absolut. Penduduk Jakarta yang bekerja akan didominasi oleh pekerja laki-laki sebanyak 2,92 juta orang (61,57%) pada tahun 2021. Tenaga kerja perempuan sebanyak 1,82 juta (38,43%). Ada 440.000 pengangguran (8,50%). Pengangguran terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 279.000 orang (63,45%). Pada saat yang sama, ada 161.000 perempuan yang menganggur (36,55%).

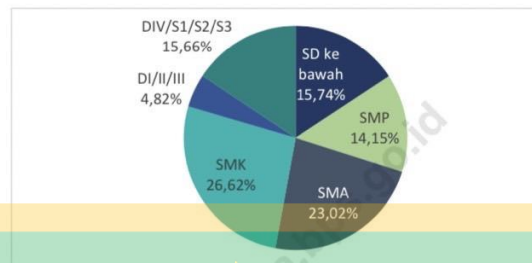
Angka pengangguran di kota Jakarta semakin meningkat karena jumlah penduduk yang semakin padat, sebab lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat

menyerap semua tenaga kerja yang tersedia. Hal ini disebabkan urbanisasi yang padat dari desa ke kota atau kota kecil lainnya ke kota besar. Alasan lainnya adalah faktor pendidikan, karena di kota-kota besar banyak pekerja yang sebagian besar berpendidikan rendah. Untuk membuat kota menjadi lebih maju, diperlukan sumber daya manusia yang terampil. Padahal, kota-kota besar membutuhkan banyak tenaga ahli di berbagai bidang sektor formal, seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Namun, banyak tenaga kerja saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk keterampilan ini. Akibatnya, banyak yang menganggur meski tersedia lapangan kerja.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat peraturan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi usia penyedia jasa lainnya perorangan menjadi maksimal 56 tahun. Hal ini dilakukan untuk menekan taraf pengangguran usia produktif, sebab berdasarkan data yang ada jumlah pengangguran usia produktif pada DKI Jakarta masih tinggi yaitu hampir mencapai angka 440 ribu orang menggunakan didominasi usia 16-30 tahun. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, pemerintah DKI Jakarta mengharapkan adanya regenerasi pekerja dapat mengoptimalkan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI. Saat ini, Pemprov DKI mencatat penduduk usia produktif pada Jakarta yakni usia 18-56 tahun hampir berada pada angka 70 % asal total penduduk pada Jakarta di tahun 2021 mencapai 10,64 juta jiwa.

Namun, pengangguran di Jakarta pada Agustus 2021 didominasi oleh kaum muda yakni sebanyak 439.899 orang. 271.134 dari mereka berusia antara 16 dan 30 tahun. Pengangguran terbanyak adalah orang berpendidikan sarjana (SMA) sebanyak 69.435 orang dan orang berpendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 120.319 orang dan disusul sebanyak 39.850 orang yang menyelesaikan gelar sarjana. Berdasarkan data yang tersedia dalam website BPS Jakarta pada tahun 2020, tenaga kerja DKI Jakarta didominasi oleh tenaga kerja terdidik bergelar profesi dan sarjana yaitu sebanyak 2,57 juta orang (49,63%). Sementara itu, jumlah tenaga kerja tidak terampil (SMA ke bawah) sebanyak 1,55 juta orang (29,89%). Sisanya 20,48 persen adalah lulusan perguruan tinggi, bervariasi dari strata 1 hingga 3. Tenaga kerja laki-laki dan perempuan sama-sama didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, 53,05 persen dan 44,12 persen.

TPAK untuk lulusan perguruan tinggi merupakan TPAK yang tertinggi jika dibandingkan dengan TPAK lulusan SMP ke bawah dan lulusan SMA/SMK. TPAK lulusan perguruan tinggi mencapai 75,54 persen. Adapun TPAK lulusan SMA/SMK sebesar 66,95 persen dan TPAK lulusan SMP ke bawah hanya sebesar 51,16 persen.

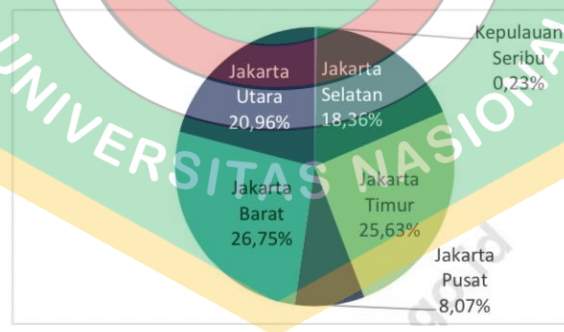


Gambar 1.2

Presentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, Agustus 2020

Sumber diakses melalui website jakarta.bps.go.id

Pada Agustus 2021, Kota Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah pengangguran paling banyak se-Jakarta, yaitu sebanyak 118 ribu orang (26,75 %). Sedangkan wilayah dengan jumlah pengangguran paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebanyak 1.015 orang (0,23 %).



Gambar 1.3.

Presentase Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta per Agustus 2021

Sumber diakses melalui website jakarta.bps.go.id

TPT tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara sebesar 9,84 persen, sedangkan TPT terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 7.33 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT tertinggi untuk laki-laki terjadi di Kota Jakarta Utara (10,93 %) sedangkan untuk perempuan terjadi di Kota Jakarta Barat (8,45 %). TPT terendah untuk laki-laki terjadi di Kota Jakarta Selatan yaitu sebesar 7.17 persen, sedangkan TPT terendah untuk perempuan terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 4,99 persen. Sebagian besar kabupaten/kota memiliki TPT laki-laki yang lebih tinggi daripada TPT perempuan, namun ada dua kota yang memiliki keadaan sebaliknya yaitu Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur. Selama periode Agustus 2020-Agustus 2021, hanya Kabupaten Kepulauan Seribu yang mengalami peningkatan TPT yaitu naik sebesar 1.22 persen poin menjadi 8,58 persen. Adapun untuk lima kota lainnya mengalami penurunan TPT dengan penurunan TPT terbesar di Kota Jakarta Selatan yaitu turun 3,46 persen poin menjadi 7.33 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Ibu Kota Jakarta masih tergolong tinggi, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Jakarta. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dengan berdasarkan pada survei penulisan terdahulu dan juga informasi media online resmi yang ada yaitu,

Pertama, minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Tingginya jumlah dan kepadatan penduduk di Jakarta tidak mampu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja situasi ini menyebabkan banyak penduduk yang telah masuk usia

kerja tidak memiliki pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh investasi yang ada di Jakarta. Investasi yang masuk Jakarta saat ini bersifat padat modal yang artinya lebih sedikit membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja di Jakarta saat ini tidak setinggi pada periode sebelumnya.⁵

Kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Pengangguran juga terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal. Minimnya penyerapan tenaga kerja lokal disebabkan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Investor lebih banyak memilih menggunakan tenaga kerja asing untuk kegiatan operasionalnya. Hal ini membuat para pencari kerja lokal sangat sulit untuk bersaing sebab kurang kompeten apabila dibandingkan dengan tenaga kerja pendatang.⁶

Ketiga, terjadinya penurunan perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan angka pengangguran di Ibu Kota. Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena Covid-19. Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁷ Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, membuat perusahaan tersebut memutus hubungan kerja karyawan-karyawannya, di mana

⁵ Khodijah Ishak. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia*. Journal STIE Syariah Bengkalis.

⁶ *Ibid.* Hlm 26.

⁷ Fahri, dkk. 2019. *Meningkatnya Angka Pengangguran Di tengah Pandemi (Covid-19)*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2.

salah satu penyebab pengangguran ialah PHK.

Dengan mencermati angka pengangguran usia muda atau produktif yang tinggi Pemprov DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 menerbitkan Pedoman Pengendalian Penggunaan PJLP dengan membentuk tim pengendalian yang diketuai Sigit Wijatmoko Kepgub itu mengatur batasan usia tenaga non-Aparatur Sipil Negara (AN) minimal 18 hingga maksimal 56 tahun yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Dalam pembentukannya, terdapat tugas dan wewenang untuk memantau pengelolaan PJLP, verifikasi, dan validasi analisis pekerjaan, analisis beban kerja, risiko pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan PJLP. Lebih lanjut, kata dia, klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam keputusan gubernur (kepgub) tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan usia produktif. Klasifikasi itu terdiri dari tenaga lapangan umum, seperti petugas mekanikal elektrik, petugas kebersihan dalam dan luar gedung, keamanan, pemulasaran jenazah, pengemudi, dan lainnya. Kemudian juga tenaga teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolah data pengukuran, arsitek perizinan, *customer relations*, dan lain sebagainya. Pemprov DKI berharap Kepgub baru tersebut mampu memberi peluang lebih besar bagi kelompok usia muda dan produktif untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kriteria.

Dalam mengatasi masalah pengangguran sebagai salah satu tugas dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melimpahkan kewenangan masalah ketenagakerjaan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan berbagai upaya dan program. Di dalam melaksanakan program Pemerintahan ada beberapa strategi untuk menjadi pedoman agar program

bisa berjalan secara efektif dan efisien menurut Mubarak strategi implementasi ini nanti bisa digunakan untuk merealisasikan dan menghindari resiko kegagalan yang lebih besar.⁸ Strategi yang pertama Pilot Project merupakan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk miniatur sebelum diterapkan ke skala besar kebijakan yang sesungguhnya dan lebih besar untuk menghindari efek yang lebih besar pula jika program tersebut gagal untuk mencapai tujuannya. Kedua Partnership pelaksanaan kebijakan dengan melakukan kemitraan yang bersifat kooperatif antara pemerintah dan swasta. Strategi kontak sewa dilakukan dengan cara memberikan hak kepada swasta untuk memberikan pelayanan dengan batas waktu tertentu, dan jika batas waktunya tiba maka pemerintah bisa mengambil alih kembali program tersebut dengan segala prospektifnya. Strategi selanjutnya lebih mengarah kepada bagaimana birokrasi secara internal kelembagaan mensiasati efektifitas program yakni *administrative decentralization*, dengan pemberian keleluasaan yang besar bagi birokrasi/aparat pelaksana untuk mengambil keputusan mandiri misalnya pencairan dana, rekrutmen personal dan improvisasi. Terakhir, *controlled decentralization* yaitu pendelegasian kewenangan pada aparat yang lebih rendah dengan control yang jelas, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program (Mubarak, 2012).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat Kota Jakarta untuk ikut serta dalam program Kartu Prakerja agar dapat meningkatkan kompetensi

⁸ Andini Fitria Putri, 2019, *Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Menanggulangi Pengangguran di Provinsi Sumatra Barat*, Jurnal Residu, Vol3.

berbasis bantuan pelatihan kerja dengan harapan dapat menciptakan SDM yang berkualitas. Standar kebijakan program Kartu Prakerja diatur dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Hal ini mengindikasikan Program Kartu Prakerja telah menetapkan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tujuan kebijakan, yakni untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendorong tumbuhnya wirausaha dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyatakan pelatihan online tidak efektif disaat pandemi. Kurang minatnya peserta untuk mengikuti pelatihan dikarenakan pelatihannya hanya menonton secara *online* dan membuat peserta bosan dan secara tidak langsung tidak meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh penerima manfaat program.⁹

Program kartu prakerja adalah sebuah program pengembangan kompetensi dan kewirausahaan, yang memungkinkan peserta program untuk meningkatkan keterampilan, Program Kartu Prakerja menasar pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kapasitas, pelatihan sertifikasi, dan keterlibatan usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk keuangan bantuan. Program kartu prakerja ini tersedia untuk seluruh warga negara Indonesia dan ramah difabel, sehingga pemerintah mendorong penyandang disabilitas untuk mengikuti program kartu prakerja. Dengan skema kartu prakerja, pemerintah berharap skema tersebut dapat membantu para pencari kerja dan

⁹ Trianti, 2022, *Kinerja Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Jakarta Timur*, e-jurnal undip, Vol 12 No 1.

masyarakat yang terkena PHK, membantu menambah keterampilan dan pengetahuan baru.

Dengan bekal pelatihan dari kartu prakerja, sertifikat pelatihan, dana insentif ini diharapkan dapat mempermudah peserta dalam mencari pekerjaan dan membuka usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Sistem pelaksanaan program Kartu Prakerja menggunakan sistem yang serba digital berarti tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan sejak tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran yang dikhususkan untuk skema kartu prakerja. Anggaran awal ditetapkan hanya Rp10 triliun untuk membantu pencari kerja yang membutuhkan pelatihan dan korban PHK, kemudian ditingkatkan menjadi Rp20 triliun untuk kebutuhan pelatihan dan program bantuan sosial selama pandemi. Manfaat program kartu prakerja sebagai bagian dari bansos di era pandemi COVID-19, diyakini mampu mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia karena insentif yang didapat peserta. Selain itu, program pra kerja diyakini dapat meningkatkan produktivitas mereka yang terkena PHK dan pencari kerja, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang diberikan. Oleh karena itu diharapkan mampu memenuhi kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing unggul di Indonesia dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan Indonesia khususnya masalah tingkat pengangguran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat beberapa web khusus para pencari kerja untuk memudahkan para pencari kerja mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan diantaranya adalah Karir jakarta, Jknaker.id, dan Karir

Hub. Seluruh web ini dapat diakses melalui laman website [dinaskertrans jakarta](http://dinaskertrans.jakarta.go.id). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta juga mendorong penempatan tenaga kerja luar negeri dan penempatan melalui sektor informal dan kewirausahaan. Dalam menopang pelatihan kerja, baik sarana dan prasarana BLK secara berangsur. Selain itu Disnakertrans Prov. DKI Jakarta juga melakukan program pemagangan bagi angkatan kerja yang mempunyai kompetensi dan memenuhi syarat untuk disalurkan ke berbagai perusahaan didalam negeri maupun keluar negeri. Program pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Pemagangan ini juga dapat berpengaruh mengurangi angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam merumuskan dan menjalankan strategi dalam ketenagakerjaan yang mana salah satu masalahnya adalah soal pengangguran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Penulisan tentang Strategi Dinas Ketenagakerjaan Jakarta dalam Menganggulangi Pengangguran yang ada di DKI Jakarta, yang dituangkan dalam penulisan yang berjudul: **Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Jakarta (Studi: Kartu Prakerja) Tahun 2021-2022**. Alasan penulis mengambil judul ini adalah untuk mengetahui dan mendalami strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi angka pengangguran yang meningkat tajam akibat adanya pandemi Covid-19. Dikarenakan masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup kompleks di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta maka sangat penting bagi Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengatasi masalah pengangguran yang meningkat di Jakarta.

Sebab jika tidak masalah ini akan berdampak pada masalah sosial lainnya seperti meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi salah satunya disebabkan karena meningkatnya angka pengangguran di kota tersebut. Apabila strategi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dan tepat sasaran maka akan dapat menekan tingkat pengangguran yang ada di DKI Jakarta dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk dapat menekan tingkat pengangguran yang ada. Dengan melihat program dan strategi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan berjalan dan mempunyai tujuan untuk menambah keterampilan, wawasan ilmu dan pengetahuan serta etos kerja. Para pencari kerja nantinya diharapkan mampu membuka lapangan kerja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yang dapat di teliti yaitu: “Bagaimana Strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam Menanggulangi Pengangguran di Jakarta? (Studi: Kartu Prakerja Tahun 2021-2022)”

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka tujuan Penulisan yang ingin dicapai dalam Penulisan ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam menanggulangi pengangguran di Jakarta Tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan dalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui Penulisan ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai strategi dinaskertrans Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi pengangguran yang ada di Jakarta dan diharapkan bisa menjadi bahan studi perbandingan bagi Penulisan selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian dengan topik pembahasan yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat menggambarkan strategi dinaskertrans Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam hal mengurangi angka pengangguran yang melonjak di Jakarta dan diharapkan masyarakat dapat mengetahui adanya strategi yang telah dibuat oleh dinaskertrans Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi di DKI Jakarta. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta agar dapat mewujudkan strategi yang telah ada untuk dapat

mengurangi angka pengangguran di Jakarta yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis hendak menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang kasus, pokok kasus, tujuan serta faedah riset, dan sistematika riset.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis hendak menguraikan teori dan konsep yang mejadi dasar dari riset yang diambil dari beberapa literatur yang relevan dengan disertasi serta riset tipe yang lain.

Bab III : METODELOGI PENULISAN

Pada bab ini hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset. Metode pengumpulan informasi, metode pengecekan keabsahan informasi. analisis informasi melalui pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

Bab IV : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai gambaran universal Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan hasil analisis mengenai Strategi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI

Jakarta Dalam Menanggulangi Pengangguran di Jakarta (Studi: Kartu Prakerja) Tahun 2021-2022.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini dijabarkan mengenai simpulan dari hasil riset yang dicoba serta anjuran yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan hasil riset yang sudah dilakukan

